

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PEMERINTAH DAERAH



YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PEMERINTAH DAERAH



KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Terbentuknya SDGs merupakan suatu hal yang patut dirayakan oleh pemerintah daerah di seluruh dunia. Bahkan sebelum ditetapkannya 17 tujuan tersebut, inklusivitas dari proses Pasca-2015 sendiri telah merepresentasikan sebuah kemenangan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PBB menyelenggarakan perundingan terbesar dalam sejarahnya untuk agenda Pasca-2015 ini. Selama proses tersebut, UCLG, yang memfasilitasi taskforce global bagi pemerintah daerah, mendorong untuk dibuatnya satu tujuan khusus terkait urbanisasi berkelanjutan dan mendesak agar seluruh tujuan dan target mempertimbangkan keberagaman konteks, peluang dan tantangan pada level sub-nasional.

Merupakan hasil dari perjuangan keras pemerintah daerah, asosiasi terkait dan juga komunitas urban. Tujuan 11 menandakan sebuah langkah besar menuju pengakuan terhadap kekuatan transformatif urbanisasi untuk pembangunan, dan peran pemimpin-pemimpin daerah untuk mendorong perubahan global secara bottom-up.

Akan tetapi, peran pemerintah daerah dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan ini jauh melebihi Tujuan 11. Seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki target yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan keseharian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bukan sekedar pelaksana dari agenda pembangunan. Pemerintah daerah adalah pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah.

Anggota-anggota UCLG berkomitmen untuk berkontribusi secara proaktif terhadap kemitraan global yang baru antara lembaga internasional, pemerintah nasional, masyarakat, sektor privat dan tentunya, pemerintah daerah. Kami akan terus menggunakan platform global untuk menyuarakan potensi daerah dalam mendukung pembangunan dan mengajak pemerintah daerah untuk memenuhi perannya dalam pencapaian agenda yang ambisius, universal, dan terpadu ini.



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1 TANPA
KEMISKINAN



2 TANPA
KELAPARAN



3 KEHIDUPAN SEHAT
DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN
BERKUALITAS



5 KESETARAAN
GENDER



6 AIR BERSIH DAN
SANITASI LAYAK



7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN



12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB



13 PENANGGANAN
PERUBAHAN IKLIM



14 EKOSISTEM
LAUT



15 EKOSISTEM
DARATAN



16 PERDAMAIAN,
KEADILAN, DAN
KELEMBAGAAN YANG
TANGGUH



17 KEMITRAAN
UNTUK MENCAPAI
TUJUAN



SDG 01

Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana

MDG
TERKAIT



MENGENTASKAN
SEGALA BENTUK
KEMISKINAN
DI MANA PUN

Mengapa SDG1 penting bagi pemerintah daerah?

SDG 1 menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran.

Tanggung jawab kita terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi, menjadikan kita sebagai mitra utama untuk mencapai SDG 1.

Kita juga dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- *Financing for Development • Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 pada tahun 2030, **MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTRIM** untuk seluruh masyarakat di dunia, yaitu masyarakat yang hidup di bawah \$1.25 per hari

1.2 pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam **SEGALA DIMENSI KEMISKINAN** berdasarkan pengertian nasional

1.4 pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro

1.5 pada tahun 2030, **MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN** dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya

SDG 02

Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernaltri sepanjang tahun

MDG
TERKAIT



1
MEMBERANTAS
KEMISKINAN DAN
KELAPARAN

**MENGAKHIRI
KELAPARAN**
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN
DAN MENINGKATKAN GIZI
DAN MENDUKUNG PERTANIAN
BERKELANJUTAN.

Mengapa SDG2 penting bagi pemerintah daerah?

Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal.

Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak.

Pemerintah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 pada tahun 2030, **MENGAKHIRI KELAPARAN** dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun

2.2 pada tahun 2030, **MENGAKHIRI SEGALA BENTUK MALNUTRISI**, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula

2.3 pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan **PRODUSEN MAKANAN BERSKALA MIKRO**, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui **AKSES YANG TERJAMIN DAN SETARA** terhadap tanah, sumberdaya produksi lainnya, **PENGETAHUAN**, layanan finansial, **PASAR** dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- *Financing for Development • Beijing +20 • Climate Change*

SDG 03

Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur

MDG
TERKAIT



MENURUNKAN ANGKA
KEMATIAN ANAK



MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN IBU



MEMERANGI HIV/AIDS,
MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA



**MENJAMIN
KEHIDUPAN SEHAT
DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN
BAGI SEMUA DI SEGALA USIA**

Mengapa SDG3 penting bagi pemerintah daerah?

Penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui program perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar.

HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan seringkali bertindak sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang tinggi, pusat sarana transportasi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membiasakan kegiatan terkait HIV/AIDS di seluruh departemen, serta mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggapan. Telah banyak pula pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS.

Pemerintah daerah dapat menggunakan perencanaan kota dan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, menelihara gaya hidup sehat dan mencegah kematian akibat kecelakan lalu lintas.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada pengurangan angka kematian akibat polusi air dan tanah melalui manajemen sumber daya alam yang efektif dan perindungan terhadap lingkungan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III • Climate Change*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 pada tahun 2030, mengurangi rasio **KEMATIAN IBU** menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

3.2 pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita

3.3 pada tahun 2030, mengakhiri epidemic *AIDS, tuberculosis, malaria*, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang **DITULARKAN LEWAT AIR** dan penyakit menular lainnya

3.6 pada tahun 2020, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat **KECELAKAAN LALU LINTAS**

3.7 pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan **LAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI**, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

3.9 pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta **PENCEMARAN DAN POLUSI** udara, air, dan tanah

SDG 04

Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana

MDG
TERKAIT



MENCAPI PENDIDIKAN
DASAR UNTUK SEMUA



MENJAMIN
PENDIDIKAN YANG INKLUSIF
DAN SETARA SECARA KUALITAS
DAN MENDUKUNG KESEMPATAN
BELAJAR SEUMUR HIDUP BAGI SEMUA.

Mengapa SDG4 penting bagi pemerintah daerah?

Pendidikan, khususnya pada tingkat dasar, merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah di banyak negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian SDG4.

Pemerintah daerah berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah.

Pemerintah daerah dapat memadukan program pelatihan teknis dan kejuruan ke dalam strategi pengembangan ekonomi lokal, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan peluang kerja.

Kedudukan yang dimiliki pemerintah daerah secara khusus memungkinkan untuk menjangkau individu dan masyarakat yang rentan dan termarjinalisasi serta memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Beijing +20* • *Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan **PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH** gratis, setara dan berkualitas

4.2 pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap **PENGEMBANGAN MASA KANAK-KANAK AWAL** yang berkualitas, **PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH**

4.3 pada tahun 2030, menjamin **AKSES YANG SETARA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI** terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

4.4 pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk **KEAHLIAN TEKNIS DAN KEJURUAN**, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha

4.5 pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin **AKSES YANG SAMA TERHADAP SEMUA TINGKATAN PENDIDIKAN** dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan

4.7 pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui **PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya

4.a MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN MUTU FASILITAS PENDIDIKAN yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

SDG 05

Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.



MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN.



Mengapa SDG5 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan yang tidak mendiskriminasi penduduknya dan praktik kerja yang adil.

Pemerintah daerah berada pada garis terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani kekerasan dan perilaku yang membahayakan perempuan. Perencanaan kota (khususnya melalui pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka publik) dan kebijakan daerah merupakan alat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah memiliki peran yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh kepemilikan dan hak guna lahan.

Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan daerah merupakan prioritas utama dalam memberdayakan perempuan, selain memenuhi hak perempuan pada hakikatnya, juga karena pemerintah daerah seringkali merupakan langkah awal menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah dapat mematahkan stereotype gender dan menginspirasi anak-anak perempuan lainnya.

Pemerintah daerah dapat mengupayakan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pekerjaannya untuk menangkal berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 mengakhiri **SEGALA BENTUK DISKRIMINASI** terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun

5.2 menghapuskan **segala bentuk KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN** dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecahan seksual dan bentuk eksplorasi lainnya

5.3 menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan

5.4 menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui **PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK, INFRASTRUKTUR, DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL** serta **MENDORONG ADANYA TANGGUNG JAWAB BERSAMA** dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar

5.5 memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan **PADA TIAP JENJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN UMUM, EKONOMI, DAN POLITIK**

5.a melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan **HAK YANG SAMA** terhadap **SUMBERDAYA EKONOMI** dan juga akses terhadap **KEPAMILIKAN DAN KONTROL ATAS LAHAN** serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara

5.c mengangkat dan menguatkan **KEBIJAKAN YANG JELAS SERTA PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN** untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua tingkat

SDG 06

Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi

MDG
TERKAIT



MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

MENJAMIN
KETERSEDIAAN
DAN MANAJEMEN
AIR DAN SANITASI
YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA.



Mengapa SDG6 penting bagi pemerintah daerah?

Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan tanggungjawab yang seringkali berada di bawah pemerintah daerah, dan sangat bergantung pada pemerintahan yang efektif, manajemen sumber daya serta perencanaan kota.

Tantangan yang dihadapi daerah-daerah dapat bervariasi, khususnya antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Tantangan terbesar di kawasan perkotaan seringkali berupa minimnya akses terhadap layanan dasar di permukiman informal, atau tarif yang tinggi dan kurangnya pengendalian mutu oleh penyedia air swasta. Sementara di kawasan perdesaan, meski air tersedia secara bebas di alam, perjalanan yang harus ditempuh untuk memperoleh air dari sumbernya sangatlah panjang, dan memiliki kemungkinan untuk tercemar.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas air melalui langkah-langkah perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan.

Manajemen sumberdaya air yang terpadu membutuhkan kerjasama dalam perencanaan dan kebijakan lingkungan antara daerah yang berdekatan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk mendukung pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis partisipasi oleh masyarakat, termasuk para penduduk permukiman kumuh.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Climate Change* • *Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan universal terhadap **AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU** untuk semua

6.2 pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan cukup terhadap **SANITASI** dan kebersihan untuk semua, serta mengakhiri defekasi terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan

6.3 pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan **MENGURANGI PENCEMARAN**, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan **MENINGKATKAN PRAKTIK DAUR ULANG DAN PENGGUNAAN ULANG** yang aman dalam jumlah substansial secara global

6.4 pada tahun 2030, meningkatkan **PENGGUNAAN AIR YANG EFISIEN** secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air secara subsansial

6.5 pada tahun 2030, menerapkan **PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG TERINTEGRASI** pada tiap tingkat, termasuk melalui kerjasama lintas batas bila diperlukan

6.6 pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah resapan air serta danau

6.b mendorong dan meningkatkan **PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL** dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi

SDG 07

Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan

MDG
TERKAIT



MEMASTIKAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP



**MENJAMIN AKSES TERHADAP
ENERGI YANG TERJANGKAU,
DAPAT DIANDALKAN, BERKELANJUTAN
DAN MODERN BAGI SEMUA.**

Mengapa SDG7 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan ber-investasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik.

Di perkotaan, transportasi umum dan kebijakan perencanaan kota, serta teknologi 'smart city' baru dapat memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi energi dan emisi karbon.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Climate Change* • *Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 pada tahun 2030, menjamin **AKSES YANG UNIVERSAL** terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern

7.2 pada tahun 2030, meningkatkan proporsi **ENERGI TERBARUKAN** dalam rasio penggunaan sumber energi dunia

7.3 pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan **EFISIENSI ENERGI** dunia

SDG 08

Tujuan ini berbicara tentang menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua

RELATED
MDG



MEMBERANTAS
KEMISKINAN DAN
KELAPARAN

**MENDUKUNG
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,
PENYERAPAN TENAGA KERJA PENUH DAN
PRODUKTIF SERTA **PEKERJAAN
YANG LAYAK** BAGI SEMUA**



Mengapa SDG8 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah dapat menghasilkan pertumbuhan dan pekerjaan dari bawah melalui pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Pemerintah daerah dapat mencegah adanya pekerja anak, dan mengupayakan agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan sektor informal untuk meningkatkan kesehatan kerja dan perlindungan sosial serta mendorong pembentukan usaha mikro, kecil dan menengah bilamana memungkinkan.

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta menjamin kesetaraan upah pekerja antar gender untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah daerah juga dapat menyertakan praktik ini sebagai bagian dari kriteria pengadaan ketika bekerja dengan sektor swasta.

Pemerintah daerah berada pada posisi yang strategis untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam menentukan biaya dan keuntungan dari pengembangan pariwisata serta mengembangkan rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan di sektor ini berkelanjutan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III*
- *Agenda 21 for Culture*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

8.3 memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, **PENCiptaan LAPANGAN KERJA YANG LAYAK**, kewirausahaan, **KREATIVITAS DAN INOVASI**, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan

8.5 pada tahun 2030, mencapai penyerapan ketenagakerjaan yang produktif dan menyeluru serta **PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SELURUH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, serta **KESETARAAN UPAH UNTUK PEKERJAAN YANG BERNILAI SETARA**.

8.6 pada tahun 2020, mengurangi proporsi **PEMUDA** yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih.

8.7 segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan menghilangkan penyerapan **TENAGA KERJA ANAK-ANAK**, mengentaskan **KERJA PAKSA**, dan mengakhiri segala bentuk penyerapan tenaga kerja anak termasuk pengerahan dan pemanfaatan tentara anak-anak pada tahun 2025

8.8 melindungi hak-hak pekerja dan mendukung **LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN** bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran dan pekerja tidak tetap.

8.9 pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung **PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MAMPU MENCiptakan LAPANGAN KERJA, MENDUKUNG BUDAYA DAN PRODUK LOKAL**

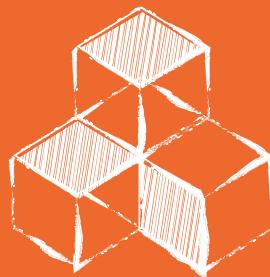
SDG 09

Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia

MDG
TERKAIT



MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR
BERKETAHANAN MENDUKUNG
INDUSTRIALISASI YANG INKULSIF DAN
BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG
INOVASI.



TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

9.1 membangun **INFRASTRUKTUR** yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada **AKSES YANG TERJANGKAU DAN SAMA RATA BAGI SEMUA**.

9.3 meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai.

9.c meningkatkan **AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI** secara signifikan dan berupaya untuk menyediakan **AKSES INTERNET** yang terjangkau dan universal di negara-negara terbelakang pada tahun 2020

Mengapa SDG9 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah kawasan metropolitan khususnya sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya

Pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis start-up sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal.

Pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi infomasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatannya, khususnya melalui penyediaan ruang publik seperti perpustakaan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Habitat III*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- *Climate Change*

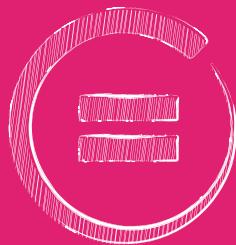
SDG 10

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin

MDG TERKAIT



MENGURANGI
KESENJANGAN
DI DALAM DAN DI ANTARA
NEGARA-NEGARA.



Mengapa SDG10 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu negara. Penyaluran sumber daya kepada pemerintah daerah di kawasan-kawasan yang paling membutuhkan menjadi sangat krusial, begitu pula dengan meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dan pengasingan.

Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam meningkatkan inklusifitas di tingkat daerah. Pemerintah dapat mendorong partisipasi kelompok minoritas dalam proses konsultasi publik dan pemilihan umum.

Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di dalam lembaga-lembaga dan praktik kerja pemerintahan, serta menjadikannya sebagai kriteria pengadaan barang dan jasa publik. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi dalam menyediakan pelayanan umum.

Pemerintah daerah dapat menerapkan pajak progresif sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskalnya dan mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi rumah tangga termiskin di masyarakat

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan menjaga **PERTUMBUHAN PENDAPATAN DARI 40% POPULASI** terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional.

10.2 pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau status lainnya.

10.3 menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan **MENGHILANGKAN PERATURAN, KEBIJAKAN, DAN PRAKTIK YANG MENDISKRIMINASI** serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut.

10.4 mengangkat kebijakan **FISKAL, UPAH, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL** dan secara progresif mencapai kesetaraan.

10.7 memfasilitasi **MIGRASI** dan mobilisasi manusia yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Habitat III* • *Beijing +20*

Tujuan ini adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi

MDG
TERKAIT



MEMASTIKAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP



MEWUJUDKAN KOTA-KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN.

Mengapa SDG11 penting bagi pemerintah daerah?

Tujuan ini mengajak pemerintah daerah secara langsung untuk memainkan perannya dalam mewujudkan Agenda Pasca-2015.

Pesatnya urbanisasi yang dialami banyak kota di belahan selatan dunia telah menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh. Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk mencegah pertumbuhannya dan bekerjasama dengan para pemukim untuk melakukan peremajaan permukiman. Akses terhadap perumahan yang terjangkau juga menjadi permasalahan di kota-kota terkaya dunia; pemerintah daerah harus mengintervensi pasar lahan dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi penduduk termiskin.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mendorong penggunaan transportasi umum di kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi emisi. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang aman seperti taman, alun-alun, dan kebun bagi penduduknya.

Dalam konteks pesatnya laju urbanisasi global, perencanaan partisipatif menjadi sangat penting dalam mencegah urban sprawl, mengatasi segregasi dan mengurangi emisi karbon di perkotaan.

Pengolahan limbah padat yang berkelanjutan juga penting dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perkotaan.

Ragam warisan budaya dapat ditemukan di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam menentukan, mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya tersebut untuk generasi mendatang.

Banyak kota, khususnya kota-kota pesisir, telah menerima dampak dari perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan perubahan iklim dan melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap bahaya bencana alam.

Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa tidak ada kota yang mampu berdiri sendiri. Kerjasama antardaerah perlu dijalin agar kota-kota dapat berfungsi secara sinergis dengan kawasan perdesaan sebagai penyedia bahan pangan dan sumberdaya alam bagi kawasan perkotaan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Habitat III • Climate Change*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- *Agenda 21 for Culture*



TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

11.1 pada tahun 2030, menjamin akses terhadap **PERUMAHAN DAN PELAYANAN DASAR** yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh.

11.2 pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya dengan memperbanyak **TRANSPORTASI UMUM**, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan manula.

11.3 pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk **PERENCANAAN** dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara.

11.4 memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga **WARISAN ALAM DAN BUDAYA** dunia.

11.5 pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap **PDB** yang diakibatkan oleh **BENCANA**, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan.

11.6 pada tahun 2030, mengurangi **DAMPAK LINGKUNGAN PER KAPITA DI PERKOTAAN**, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada **KUALITAS UDARA** dan **PENGELOLAAN LIMBAH**.

11.7 pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap **RUANG TERBUKA HIJAU DAN PUBLIK** yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas.

11.a mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara kawasan urban, peri-urban dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan wilayah dan nasional.

11.b pada tahun 2020, meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi terkait inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap **PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA**, melakukan pengembangan dan implementasi yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 mengenai Pengurangan Resiko Bencana.

11.c mendukung negara-negara terbelakang untuk membangun bangunan yang tangguh dan berkelanjutan menggunakan bahan dan material lokal, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan finansial.

SDG 12

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap Bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya

MDG TERKAIT



7

MENJAMIN POLA
KONSUMSI DAN
PRODUKSI
YANG BERKELANJUTAN



Mengapa SDG12 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah dapat membantu memangkas rantai pasokan melalui pengelolaan lahan, infrastruktur, perencanaan kota, pendidikan dan pelatihan serta pasar tradisional.

Pemerintah daerah memiliki peranan khusus dalam mengelola konsumsi serta produksi akan energi dan air yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan kota hingga penggunaan mekanisme block unit pricing.

Sebagai konsumen barang dan jasa, pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria pengadaan yang memperhitungkan limbah dan emisi karbon dari sumber-sumber yang mungkin.

Posisi strategis pemerintah daerah sebagai tingkat pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat, memungkinkan pemerintah daerah untuk menginkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta membekali masyarakat dengan pengetahuan dan tata cara untuk mengurangi jejak ekologis yang dikeluarkan.

Pemerintah daerah harus saling bekerjasama dalam mengembangkan dan menerapkan cara-cara untuk memantau dampak dari sektor pariwisata yang berada di bawah wewenangnya, dan memastikan bahwa sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, mengangkat budaya lokal, dan membatasi penghasilan limbah dan emisi karbon pada saat yang bersamaan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development, Habitat III • Climate Change*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

12.2 pada tahun 2030, mencapai pengelolaan **SUMBER DAYA ALAM YANG EFISIEN** dan berkelanjutan.

12.3 pada tahun 2030, mengurangi separuh dari jumlah **SAMPAH PANGAN** global perkapa pada tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai.

12.4 pada tahun 2020, meraih **MANAJEMEN LIMBAH DAN BAHAN KIMIA** yang ramah lingkungan sesuai dengan kerangka internasional yang berlaku serta mengurangi pencemarannya terhadap tanah, air, dan udara untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

12.5 pada tahun 2030, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, **PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI SAMPAH (3R)**.

12.7 mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional.

12.8 pada tahun 2030, memasikan bahwa semua orang memiliki informasi terkait dan **KESADARAN** akan pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berwawasan lingkungan.

12.b mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai cara untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap **PIRIWISATA BERKELANJUTAN YANG DAPAT MENCiptakan LAPANGAN KERJA DAN MENDUKUNG BUDAYA DAN PRODUK LOKAL.**

SDG 13

Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global

MDG
TERKAIT



ENSURE
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY



SEGERA MENGAMBIL
TINDAKAN UNTUK
MELAWAN **PERUBAHAN IKLIM**
DAN DAMPAKNYA

Mengapa SDG13 penting bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah, khususnya di perkotaan, sering kali menjadi pionir dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bahaya perubahan iklim dan bencana alam agar dapat melindungi masyarakat, terutama yang paling rentan.

Pemimpin-pemimpin daerah dikenal karena kemampuan mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim bersama mereka.

Penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap gangguan lingkungan.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Habitat III* • *Climate Change*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- *carbon Cities Climate Registry (cCCR)* • *Compact of Mayors*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

13.1 Meningkatkan **DAYA TAHAN** dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara.

13.3 Memperbaiki pendidikan, **PENINGKATAN KESADARAN** dan kapasitas sumber daya manusia serta lembaga dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

13.b mengedepankan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas demi **PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN IKLIM** yang efektif di negara-negara terbelakang, termasuk berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan yang termarjinalisasi.

SDG 14

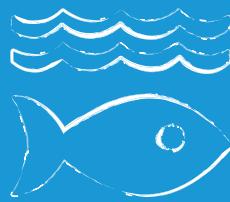
Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan

MDG TERKAIT



MEMASTIKAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

7



MENGKONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MARITIM, LAUT, DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Mengapa SDG14 penting bagi pemerintah daerah?

Hampir 80% dari polusi di lautan berasal dari kegiatan-kegiatan yang ada di darat, baik di kawasan pesisir maupun lebih jauh ke pedalaman.

Banyak kota-kota terbesar di dunia terletak di pantai dan banyak kota pesisir membuang limbah industri dan limbah-limbah lainnya langsung ke lautan di sekitarnya.

Akan tetapi, melindungi lautan dan pantai bukan tanggungjawab kota-kota pesisir semata. Segala kegiatan perkotaan yang berlangsung di lembah sungai dapat memengaruhi lautan, seperti pembuangan air limbah atau limbah industri ke sungai.

Dua-per-tiga dari limbah perkotaan di dunia dialirkan ke danau, sungai, dan lautan tanpa diolah terlebih dahulu. Sanitasi perkotaan, pengelolaan limbah padat, dan kerjasama antardaerah sangat penting untuk mengurangi pencemaran daerah pesisir.

Pengembangan kota-kota pesisir perlu didukung dengan pengembangan dan implementasi rencana tata ruang serta kebijakan bangunan gedung agar sesuai dengan kemampuan lahan kawasan pesisir.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development, Habitat III • Climate Change*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran lautan, khususnya yang berasal dari **KEGIATAN DI DARATAN**, termasuk puing-puing di lautan dan pencemaran bahan makanan.

14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi **EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR** secara berkelanjutan untuk menghindari dampak signifikan, termasuk dengan melakukan pemulihan dan meningkatkan ketahannya demi mencapai lautan yang baik dan produktif

14.5 Pada tahun 2020, **MENGKONSERVASI SETIDAKNYA 10% DARI KAWASAN LAUT DAN PESISIR**, sesuai dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaru.

14.b Menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi **NELAYAN-NELAYAN KECIL**.

SDG 15

Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan margasatwa

RELATED
MDG



MEMASTIKAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

MELINDUNGI, MEMULIHAKAN,
DAN MENDUKUNG PENGGUNAAN
YANG BERKELANJUTAN TERHADAP
EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA
HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, MELAWAN
PENGGRUNAN, SERTA MENGHENTIKAN DAN
MEMBALIKKAN DEGRADASI TANAH DAN
MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI.



Mengapa SDG15 penting bagi pemerintah daerah?

Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan (terutama untuk air, sanitasi dan pengloahan limbah padat), ditambah dengan kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat, menempatkan pemerintah daerah di dalam posisi yang unik untuk melindungi sumberdaya alam dan habitat.

Pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat yang diperlukan pada tingkat daerah untuk mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya air sebagai persoalan kompleks.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian dari strategi pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga sebaiknya menggunakan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip 'pencemar membayar'.

Konservasi keanekaragaman hayati kerap membutuhkan kerjasama antardaerah, seperti dalam pembentukkan koridor keanekaragaman hayati dan satwa liar lintas batas.

Melalui fasilitasi pemerintah, manajemen dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Climate Change*
- *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

15.1 Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan **EKOSISTEM AIR TAWAR DAN DARATAN**, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional

15.2 Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan **EKOSISTEM AIR TAWAR DAN DARATAN**, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional

15.5 Segera mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya **KEANEKARAGAMAN HAYATI** serta melindungi dan mencegah **KEPUNAHAN** spesies terancam atau langka pada tahun 2020.

15.9 Pada tahun 2020, memadukan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam **PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL**, proses pembangunan serta strategi pengentasan kemiskinan.

15.b Menggerakkan **SUMBERDAYA DARI SEGALA SUMBER PADA TIAP TINGKAT** untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai bagi negara berkembang terkait hal tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi hutan.

SDG 16

Tujuan ini berberbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif

MEMPERJUANGKAN
**MASYARAKAT YANG
DAMAI DAN INKLUSI**, MENYEDIAKAN
AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA
DAN MEMBANGUN **INSTITUSI-INSTITUSI**
YANG EFEKTIF, BERTANGGUNGJAWAB,
DAN INKLUSIF PADA SEMUA TINGKAT



Mengapa SDG16 penting bagi pemerintah daerah?

Tujuan ini mendesak pemerintah daerah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggungjawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut.

Selama beberapa dekade silam, pemerintah daerah telah menjadi yang terdepan dalam menocba berbagai bentuk pengambilan keputusan partisipatif, seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif. Tujuan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya.

Mengingat tren urbanisasi global, mengurangi kekerasan di kawasan perkotaan akan menjadi sangat penting terkait upaya dalam mencapai keamanan dan perdamaian dunia.

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development* • *Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

16.1 Mengurangi segala bentuk **KEKERASAN** dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifikan.

16.5 Mengurangi segala bentuk **KORUPSI** dan penyuapan secara substansial.

16.6 Mengembangkan **LEMBAGA-LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN** di semua tingkat.

16.7 Menjamin **PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG REPRESENTATIF, PARTISIPATIF, INKLUSIF DAN RESPONSIF** di semua tingkat.

16.10 Menjamin **AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI** dan melindungi hak kebebasan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang berlaku

SDG 17

Tujuan ini berbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca-2015 yang telah disetujui

RELATED
MDG



MENGUATKAN PERANGKAT IMPLEMENTASI DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN



Mengapa SDG17 penting bagi pemerintah daerah?

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah.

Pada tingkat daerahlah kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani.

Pemerintah daerah telah berkolaborasi secara internasional selama lebih dari seratus tahun sebagai bagian dari gerakan pemerintah daerah internasional. Pemerintah daerah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kancah global.

Data-data daerah yang dapat diandalkan akan menjadi sarana penting dalam memantau kemajuan pada tingkat sub-nasional dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal

AGENDA INTERNASIONAL TERKAIT LAINNYA:

- *Financing for Development • Habitat III*

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

17.1 Menguatkan pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait **PENGUMPULAN PAJAK DAN SUMBER PENDAPATAN LAINNYA**.

17.14 Meningkatkan **KOHERENSI** KEBIJAKAN terkait pembangunan berkelanjutan.

17.16 Meningkatkan **KEMITRAAN GLOBAL** untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerjasama multi-stakeholder yang dapat menggerakkan dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finasial untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.

17.17 Mendorong dan mendukung **KERJASAMA** efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerjasama.

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan **DATA YANG BERKUALITAS, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIANDALKAN** yang terpisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status kependudukan, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks negara.

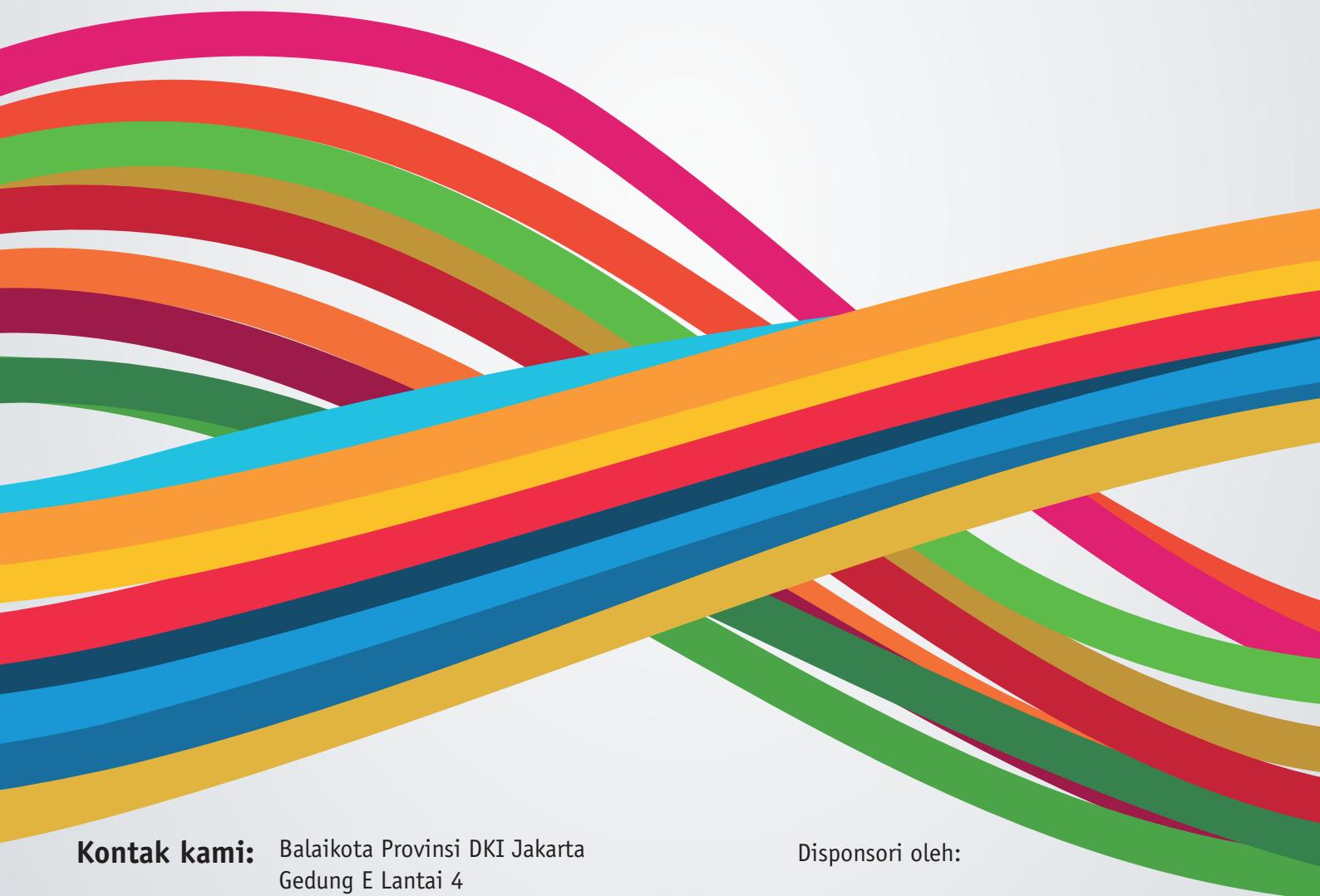
17.19 Pada tahun 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung **PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK** di negara-negara berkembang

DENGAN LANGKAH NYATA BEKERJA SAMA
MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN KOTA DAN DAERAH
DI ASIA-PASIFIC



www.uclg-aspac.org

Advocacy | Capacity Building | Policy & Research
Programmes & Projects | Decentralized Cooperation



Kontak kami:



United Cities and Local Governments
Asia-Pacific

Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Gedung E Lantai 4
Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9
DKI Jakarta 10110, Indonesia
Tel: +62 21 389 01 801
Fax: +62 21 389 01 802
info@uclg-aspac.org
www.uclg.aspac.org

Disponsori oleh:

